

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Semarang menjadi salah satu kota metropolitan, maka dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya pemerintah Kota Semarang perlu berusaha mengatur dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat dengan mengatur strategi khusus untuk menambah pendapatan daerah sendiri.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sumber penerimaan ini digunakan untuk membiayai segala kebutuhan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pasar dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang paling besar bagi daerah. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia (Malisan dkk, 2019).

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah supaya dapat optimal, Maka diperlukan biaya kebutuhan yang cukup. Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan efektif dan efisien tanpa biaya untuk memberikan pelayanan dan pembangunan (Anggraini,2015). Sebagian biaya tersebut diusahakan oleh daerah sendiri, yaitu berupa pendapatan asli daerah yang mencakupi kepentingan rumah tangga sendiri. Untuk mendukung hal tersebut, maka setiap daerah harus mampu menggali dan mendayagunakan sumber-sumber

keuangan asli daerah. Dengan pendapatan asli daerah yang cukup, maka dapat dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan guna memakmurkan rakyat.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih kurs, dan, komisi/potongan dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa. Adapun keempat sumber pendapatan tersebut akan bersinergi dan menghasilkan PAD yang mampu menunjang jalannya perekonomian di suatu daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan, PAD juga mencerminkan tingkat kemandirian dari suatu daerah. Pernyataan tersebut mengindikasikan semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, capaian tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak bergantung pada pemerintah pusat (Atpetsi, 2020).

Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya (Kemenkeu.go.id).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor penting dalam memaksimalkan potensi daerah, karena PAD merupakan salah satu sumber

pendapatan yang dapat digali dan dikelola serta dimanfaatkan secara lebih intensif oleh masing-masing daerah. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. PAD bermanfaat untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah karena PAD merupakan nilai pendapatan yang benar-benar diterima oleh daerah dan akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar nilai PAD suatu daerah berarti semakin besar anggaran pembangunan dan masyarakat akan semakin sejahtera (Keil, 2005).

Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, Plt Kepala BPKAD Kota Semarang, Agus Wuryanto menyatakan bahwa PAD dari sektor retribusi di nilai masih rendah. Ada beberapa kendala dalam pengoptimalan PAD seperti sejumlah pasar yang masih menempati tempat relokasi dan parkir berlangganan yang masih dalam tahap persiapan. Padahal dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten atau Kota mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerahnya yang antara lain berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebutlah yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait efektivitas penerimaan dan kontribusi pasar (Pratiwi, 2020).

Dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah yang serasi, dinamis dan bertanggung jawab, maka pendapatan asli daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Disamping itu

dengan semakin meningkatkan kegiatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Kota Semarang sebagai penyedia jasa untuk tujuan kepentingan umum yang diarahkan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, perlu penerimaan yang optimal dari berbagai sektor.

Perbedaan tingkat perekonomian, geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk dapat mempengaruhi besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada masing-masing kota/kabupaten di Indonesia. Kota Semarang merupakan salah satu daerah otonomi dimana harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya secara mandiri melalui pengembangan potensi-potensi yang ada di daerahnya. Kota Semarang memiliki beberapa potensi yang diharapkan mampu menyumbang pemasukan sebagai PAD melalui sektor pajak dan retribusi daerah.

Faktor utama adalah Potensi retribusi pasar dapat diartikan menentukan target penerimaan retribusi pasar pemerintah harus mengetahui seberapa besar potensi retribusi pasar, agar potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk dapat meningkatkan retribusi pasar (Wardani,2014). Potensi adalah kemampuan baik yang sudah teraktualisasi tetapi belum optimal maupun belum teraktualisasi. Berdasarkan penelitian Handayani (2017), menyatakan bahwa tidak berpengaruh antara potensi retribusi terhadap PAD. Penelitian ini sejalan dengan Mustafa (2017), yang menyatakan Potensi Retribusi tidak berpengaruh terhadap PAD. Berbeda dengan penelitian Fauzan (2016), yang menyatakan bahwa potensi retribusi berpengaruh terhadap PAD.

Faktor kedua efektivitas retribusi pasar adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan

efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Wahyuddin,2020). Apabila suatu organisasi atau lembaga mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Berdasarkan penelitian Halim (2008), menyatakan efektivitas retribusi pasar berpengaruh terhadap PAD. Penelitian ini sejalan dengan Putra (2014), yang menyatakan Efektivitas retribusi pasar berpengaruh terhadap PAD. Berbeda dengan penelitian Samosir (2019), yang menyatakan Efektivitas retribusi pasar tidak berpengaruh terhadap PAD.

Faktor ketiga yang mempengaruhi PAD adalah Kontribusi retribusi pasar. Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap PAD. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari PAD yang merupakan sumbangan dari pos retribusi pasar. Berdasarkan penelitian Anggraini (2015), yang menyatakan bahwa Kontribusi retribusi pasar tidak berpengaruh terhadap PAD. Penelitian ini sejalan dengan Soares (2015), yang menyatakan bahwa Kontribusi retribusi pasar tidak berpengaruh terhadap PAD. Berbeda dengan penelitian Lakoy (2016), yang menyatakan Kontribusi retribusi pasar berpengaruh terhadap PAD.

Menurut Prihardi menyatakan bahwa seiring dengan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pasar masuk ke Dinas Perdagangan. Tugas pokok dan fungsinya di bawah Kepala Dinas Perdagangan. Sejalan dengan itu, pengelolaan pasar tradisional ke depannya akan diserahkan kepada sebuah perusda atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dan Peraturan Daerah mengenai Perusda yang akan menaungi pengeolaan pasar-pasar tradisional itu masih dalam proses penyusunan (Jibi, Solopos.com, 2016).

Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, Plt Kepala BPKAD Kota Semarang, Agus Wuryanto menyatakan bahwa PAD dari sektor retribusi di nilai masih rendah. Ada beberapa kendala dalam pengoptimalan PAD seperti sejumlah pasar yang masih menempati tempat relokasi dan parkir berlangganan yang masih dalam tahap persiapan. Padahal dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten atau Kota mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerahnya yang antara lain berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebutlah yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait efektivitas penerimaan dan kontribusi pasar (Pratiwi, 2020).

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya pemerintah dalam penerimaan pendapatan dari retribusi pasar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **ANALISIS POTENSI RETRIBUSI, EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017-2021**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan riset gap danl teori pada latar belakang yang telah diungkapkan di atas maka secara spesifik, permasalahan penelitian ini dapat dinyatakan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah potensi retribusi pasar berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang ?
2. Apakah efektivitas retribusi pasar berpengaruh terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Semarang ?

3. Apakah kontribusi penerimaan retribusi pasar berpengaruh terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang ?
4. Apakah Potensi Retribusi, Efektivitas Retribusi, dan Kontribusi Retribusi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh potensi penerimaan retribusi pasar terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas penerimaan retribusi pasar terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.
3. Untuk menganalisis pengaruh kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.
4. Apakah Potensi Retribusi, Efektivitas Retribusi, dan Kontribusi Retribusi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian :

1. Bagi penulis

Sebagai tambahan pengetahuan dan mengetahui serta mempelajari masalah yang terkait dengan Retribusi Pasar Daerah yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi pihak akademis

Sebagai tambahan pembendaharaan lebih lanjut bagi rekan-rekan yang akan

mengadakan penelitian dalam bidang yang berkaitan dengan tulisan penelitian di masa yang akan datang.

3. Bagi Dinas

Sebagai masukan berupa saran kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang agar lebih meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang.

4. Bagi peneliti lain

Menambah informasi bagi pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah ini, terutama dapat mengetahui perkembangan peranan retribusi pasar Kota Semarang dalam melaksanakan Otonomi Daerah.

1.5 Sistematika Penelitian

Guna pengungkapan penelitian mudah dipahami dan lengkap, maka penelitian ini disusun dengan pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori yang merupakan penjelasan, mengenai dasar teoritis penelitian, penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran yang menjelaskan keterkaitan antara variabel penelitian yang diamati dalam suatu gambar dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari definisi operasional variabel penelitian yang diamati, jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian, metode yang digunakan dalam

pengumpulan data serta metode dan alat analisis yang digunakan beserta penjelasan pengukurannya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi dari obyek penelitian serta pembahasan mengenai hasil perhitungan data dengan alat analisis yang dipakai.

BAB V PENUTUP

Bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.